

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah bahwa fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang substansinya dimuat dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan. Esensi pembangunan adalah aktivitas yang berjalan simultan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan seluruh aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan, sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam meningkatkan nilai tambah pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation Planning*). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, perhatian atas perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Jambi nampaknya tetap menjadi fokus perhatian dalam penyiapan Kebijakan Umum Anggaran, karena bagaimanapun juga ketersediaan dana untuk belanja diperoleh dari pendapatan adalah tidak terlepas dari perkembangan dan prospek perekonomian Provinsi Jambi ke depan. Selanjutnya adanya ketersediaan dana dalam APBD nantinya jelas akan digunakan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara, sehingga dari pelaksanaan fungsi pemerintah tersebut, maka harapan masyarakat akan dapat kita wujudkan dan tantangan dari pelaksanaan roda pemerintahan dan

pembangunan akan dapat teratasi. Dengan demikian, Pemerintah yang diberi amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan dapat dan dapat memberikan implikasi yang lebih luas.

Beberapa tahun terakhir, sejak digulirkannya reformasi, upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk upaya pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya, sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini, sering dihadapkan pada aturan yang sangat potensial dan terkadang mengusik kinerja keuangan daerah. Kondisi ini tidak bisa kita hindari karena aturan-aturan yang dibuat tersebut, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan yang pada gilirannya akan dapat mengurangi kebocoran anggaran dan dapat dihindari pembiayaan yang tidak tepat sasaran.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan

Penyusunan KUA 2009 Perubahan adalah untuk menentukan kebijakan program prioritas yang sesuai dengan anggaran maksimum yang diberikan kepada SKPD, sehingga terpenuhinya kegiatan yang sesuai dengan skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya serta agar alokasi sumberdaya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realitas.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya dokumen KUA yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

1.3 Dasar Hukum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 34 ayat (2), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dijelaskan bahwa pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sehubungan dengan itu, maka Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan, untuk dibahas bersama dengan DPRD, yang kemudian ditetapkan dalam Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA) dan selanjutnya menjadi pedoman di dalam penyusunan APBD.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN TAHUN 2009

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang. Namun dipenghujung tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi yang dipicu bangkrutnya lembaga keuangan Amerika Serikat akibat macetnya kredit perumahan yang kemudian diikuti lembaga-lembaga keuangan di negara Eropa, menyebabkan guncangan hebat pasar uang hampir di seluruh kawasan dunia, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 7,16 persen, yang ditopang dari sektor industri pengolahan, bangunan, jasa-jasa, perdagangan dan sektor pertanian. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 7,0 - 7,2 persen yang didorong oleh sektor industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa dan sektor listrik gas dan air bersih, sektor-sektor ini diperkirakan akan tumbuh diatas 6,5 persen pada tahun 2009.

Dampak terberat krisis finansial global ini diperkirakan akan terjadi ditahun 2009 ini dan 2010 nanti. Segala upaya dari sisi moneter dan fiskal nasional sudah mulai dikerahkan untuk meminimalkan dampak krisis terhadap ketahanan ekonomi nasional. Demikian juga untuk perekonomian daerah APBD 2009, bersama konsumsi masyarakat, bahkan sangat diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini, sehingga keberhasilan pelaksanaan APBD itu akan menjadi taruhan yang amat besar bagi pemerintah

daerah, karena sumber pertumbuhan dari ekspor dan investasi akan sangat sulit diharapkan.

Krisis ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyelamatkan beberapa komoditas perkebunan, pertanian dan sektor perikanan dan peternakan, pemerintah Provinsi Jambi bersama sektor swasta dan masyarakat harus berupaya bersama dalam program penciptaan nilai tambah dan rantai nilai melalui pengembangan industri turunan dari berbagai komoditas perkebunan serta mengurangi ketergantungan ekonomi Jambi pada produk dari luar (impor) dan juga daerah lain.

2.2. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2009

Kondisi ekonomi tahun 2009 akan mempengaruhi oleh lingkungan eksternal yang diperkirakan lebih baik dari tahun 2008. Semakin meningkatnya integrasi perekonomian global disatu sisi akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi pada sisi yang lain juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian nasional dan regional serta negara tetangga yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang, yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri.

Harga komoditi dunia, termasuk minyak mentah diperkirakan akan semakin melunak. Peningkatan produksi baik OPEC maupun non OPEC, respon produksi komoditi dunia lainnya terhadap peningkatan harga yang tinggi, serta stabilitas keuangan global yang membaik akan mengurangi tekanan terhadap harga komoditi dunia pada tahun 2009, sehingga harga komoditi nasional juga diperkirakan akan membaik dan tentunya kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah Jambi pada tahun 2009.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut.

Pertama, stabilitas keamanan dan politik akan memberikan ekspektasi yang positif bagi berlangsungnya kegiatan perekonomian yang lebih baik. *Kedua*, langkah-langkah perbaikan investasi dan program-program pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya percepatan perbaikan sektor riil akan memberikan dorongan yang lebih kuat untuk peningkatan kegiatan investasi di daerah serta peningkatan kegiatan ekspor daerah. *Ketiga*, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2007 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2008, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan serta daya saing daerah. Dalam tahun 2008 realisasi investasi PMA dalam dolar Amerika Serikat meningkat dari US \$ 18,20 juta tahun 2007 menjadi US \$ 20,23 juta tahun 2008 atau tumbuh 13,30 persen, sedangkan investasi PMDN mengalami peningkatan dari Rp.8,612 trilyun tahun 2007 menjadi Rp.8,838 trilyun tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,62 persen. Peningkatan ini didorong oleh investasi di sektor pertambangan dan penganlian terutama migas.
2. Menjaga stabilitas ekonomi, terjadinya gangguan produksi pada komoditi energi dan pangan serta tingginya likuiditas ekonomi dunia dapat menimbulkan potensi yang mengakibatkan gejolak ekonomi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di daerah.
3. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2007 jumlah angka pengangguran Provinsi Jambi mencapai 76.090 jiwa sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan 74.222 jiwa atau 2,45 persen, sedangkan penduduk miskin juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2007 sebanyak 198.176 menjadi 133.137 KK tahun 2008 atau turun 32,83 persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didorong untuk menurunkan tingkat pengangguran yang dimulai

menurun dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih besar dengan mendorong kualitas pertumbuhannya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Salah satu asumsi yang mendasari tersebut adalah kondisi eksternal pada tingkat nasional.

Dalam perekonomian nasional, harga minyak mentah dunia yang diperkirakan masih tetap tinggi pada tahun 2009, diperkirakan masih berada \$ 58 per barel, sedangkan produksi minyak nasional diperkirakan masih dibawah satu juta barel perhari, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional.

Selain BBM, tarif dasar listrik juga sangat mempengaruhi kondisi perekonomian. Pada tahun 2008, pemerintah akan melaksanakan suatu kebijakan mencabut subsidi listrik untuk masyarakat dengan metode selisih kelebihan pemakaian rata-rata pemakaian nasional. Pada sisi lain, bangsa kita juga menghadapi kekurangan pasokan daya listrik di berbagai daerah, baik karena alasan operasional dan teknis maupun alasan harga pokok listrik. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun 2009.

Pada tingkat nasional, berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan terkait dengan prioritas untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Dengan demikian jumlah penduduk miskin diperkirakan menurun menjadi 12%-14% dan pengangguran terbuka diperkirakan menurun menjadi 8,5% di tahun 2009.

3.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup menggembirakan meskipun fluktuasi ekonomi nasional terus bergejolak. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 6,63 persen meningkat hingga mencapai 7,16 persen pada tahun 2008.

Melihat kondisi ekonomi yang berkembang serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tersebut, yang tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan pada triwulan IV Tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,70 persen, yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV tahun 2007 sebesar 1,57 persen. Secara triwulan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi masih didukung oleh tumbuhnya 4 (empat) sektor penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi masih didorong oleh laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pada sisi produksi, perkembangan PDRB Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama tiga tahun terakhir berasal dari sektor Industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2008 sebesar 0,44 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 0,41 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,31 persen.

Pada sisi distribusi (*share*) sektor primer merupakan penyumbang terbesar dari jumlah PDRB provinsi Jambi yaitu 44,44 persen, diikuti sektor

jasa-jasa (*tersier*) sebesar 37,52 persen dan sektor sekunder sebesar 18,04 persen. Nominal dari PDRB provinsi Jambi atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 8,21 trilyun yang secara sektoral masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 25,38 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,06 persen, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,08 persen.

Memperhatikan perkembangan pertumbuhan PDRB pada triwulan I, diproyeksikan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2008 ini masih tumbuh positif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi, diikuti dengan net ekspor dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi penawaran kontribusi pertumbuhan ekonomi Jambi masih disumbangkan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Beranjak dari kondisi tersebut, pada tahun 2009, PDRB Provinsi Jambi diprediksikan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 15,99 Trilyun. Peningkatan ini diasumsikan dengan kondisi politik dan keamanan yang kondusif, sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah semakin besar.

3.3. INFLASI

Laju inflasi dalam satu tahun merupakan akumulasi inflasi berdasarkan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen. Laju inflasi daerah Jambi dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 laju inflasi daerah Jambi sebesar 7,42 persen dan pada tahun 2008 mencapai 11,57 persen. Perkiraan tersebut dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga-harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah

mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya capital inflow ke Jambi melalui investasi baik PMDN maupun PMA.

Inflasi daerah Jambi pada triwulan I tahun 2009 minus 1,27 persen, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,16 persen. Inflasi ini terjadi adanya kenaikan harga kelompok barang dan jasa. yang terjadi ini terutama disumbangkan oleh kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi. Inflasi pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh kendala pasokan beberapa bahan makanan akibat distribusi yang kurang lancar dan faktor cuaca turut mempengaruhi kenaikan harga-harga. Faktor kenaikan harga-harga beberapa komoditas bahan pangan dan CPO serta penurunan BBM di pasar internasional juga turut mempengaruhi harga-harga komoditas dimaksud di daerah Jambi.

3.4. LAIN-LAIN ASUMSI

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 antara lain :

1. Rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar 20% yang juga akan diperhitungkan dalam RAPBD Provinsi Jambi tahun 2009.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Rencana Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009.
4. Penetapan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20%, sangat mempengaruhi sisi belanja dari APBD Provinsi Jambi.
5. Upaya untuk menstabilkan ketahanan pangan secara nasional dan diikuti oleh daerah termasuk Provinsi Jambi diperkirakan akan menjaga inflasi

pada kisaran 8,0% - 9,0% terutama untuk laju inflasi yang disebabkan kelompok bahan makanan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan target anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 2009, disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perekonomian nasional saat ini dan prediksi keadaan yang akan datang. Oleh karena itu berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2009 perlu didukung, dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah, sebagai berikut :

1. Penetapan target pendapatan daerah khususnya yang berasal dari PAD yang sudah sangat maksimal, karena dari angka potensial dan realisasi saat ini yaitu dengan peningkatan PAD sebesar 17,22% dari target tahun 2008 menunjukkan trend yang sudah optimal.
2. Dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia, yang diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit, diperkirakan akan menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan penjualan mobil di tahun 2009 nantinya.
3. Menurunnya daya beli masyarakat khususnya dari pembelian kendaraan bermotor, sehingga secara signifikan akan berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, karenanya adanya lonjakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, namun disisi lain rencana kenaikan pajak juga akan mempengaruhi sisi pendapatan.
4. Keterbatasan besaran potensi pajak daerah yang sudah optimal di pungut dan retribusi daerah yang bersifat limitatif sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2007 dan perkiraan di tahun 2008, memberikan banyak pelajaran yang berharga untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2009. Banyaknya permasalahan dan hambatan yang terjadi di dalam upaya meningkatkan pendapatan, yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Keterlambatan dalam merespon gejala-gejala eksternal seperti rendahnya kualitas pelayanan terhadap objek pajak akan membuat kehilangan momentum yang membawa konsekuensi pada tidak tercapainya target pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2009, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensial daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan pada pengoptimalkan pemanfaatan dana daerah. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, **Pertama**; melalui Intensifikasi dengan meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait terutama yang memiliki peranan secara teknis memungut pajak dan retribusi daerah serta dengan objek pajak kendaraan bermotor. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor ini dilakukan melalui pendekatan layanan terhadap objek pajak, baik melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Samsat di setiap Kabupaten maupun melalui "Sistem On Line 7070" untuk mengetahui besarnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2009 pemerintah akan diupayakan untuk lebih mengintensifkan data objek pajak yang sudah ada sehingga tidak terjadi penafsiran yang salah dalam penentuan objek pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan pengawasan dengan melakukan razia bersama dengan instansi terkait

terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak, menyempurnakan prosedur pembayaran pajak.

Upaya **Kedua** dilakukan melalui langkah ekstensifikasi pendapatan daerah Provinsi Jambi seperti pemungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan, alat angkutan diatas air dan bea balik nama kendaraan diatas air, yang pemungutannya baru dilakukan secara intensif pada tahun 2003.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan di atas, pemerintah akan terus mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak negara yang dibagihasilkan ke daerah seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH OPDN dan pasal 21) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah juga akan melakukan peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.

Tabel. 4.1. Target Pendapatan Perubahan Tahun Anggaran 2009

No	Jenis Pungutan	Pendapatan Tahun 2009 (000)	Rencana Pendapatan Perubahan Tahun 2009 (000)	Bertambah/ Berkurang (000)	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.309.785	498.243.991	17.934.206	3,73
1	Pajak Daerah	423.795.726	423.795.726	-	-
2	Retribusi Daerah:	27.781.100	40.450.100	12.669.000	45,60
	- Pelayanan Kesehatan	22.100.000	35.004.000	12.904.000	58,39
	- Pemakaian Kekayaan Daerah	4.398.500	3.979.000	(419.500)	(9,54)
	- Hasil Produksi Usaha Daerah	669.000	803.500	134.500	20,10
	- Pungutan Komoditi Perkebunan	613.600	663.600	50.000	8,15
3	Perusahaan Milik Daerah	4.500.000	9.000.000	4.500.000	100,00
	- Bank Pembangunan Daerah (BPD)				
4	Perusahaan Milik Swasta	225.000	426.991	201.991	89,77
	- Penyertaan Modal pada PT. JSP	200.000	200.000	-	-
	- Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA	25.000	226.991	201.991	807,96
5	Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya	24.007.959	24.571.174	563.215	2,35
II	DANA PERIMBANGAN	776.576.880	769.453.510	(7.123.370)	(0,92)
1	Bagi Hasil Pajak	137.000.000	129.185.695	(7.814.305)	(5,70)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	130.950.000	131.640.935	690.935	0,53
3	Dana Alokasi Umum	473.505.880	473.505.880	-	-
4	Dana Alokasi Khusus	35.121.000	35.121.000	-	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	25.049.200	25.049.200	100,00
	Total Pendapatan Daerah	1.256.886.665	1.292.746.701	35.860.036	2,85

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2008.

4.2. BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dalam satu tahun tertentu. Pada tahun 2009, total pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp.1.256.886.665.000,00 meningkat menjadi Rp.1.292.746.700.746,- atau sebesar 2,85%.

Rencana belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 diperuntukan untuk Belanja Tidak Langsung. Untuk Belanja Tidak Langsung diperuntukan untuk Subsidi Raskin sebesar Rp. 8.500.000.000,- untuk Gaji Pegawai sebesar Rp. 5.102.514.928,- untuk Tunjangan Kesejahteraan Daerah Rp. 1.927.957.872,-

Dalam menentukan kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah, harus diprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk pembayaran belanja pegawai (gaji pegawai, tunjangan, uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah) selama satu tahun anggaran, serta memperhitungkan kewajiban daerah dalam belanja tidak langsung lainnya seperti belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota; belanja bantuan keuangan; belanja tidak terduga. Disamping itu juga harus diperhitungkan belanja langsung pokok yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD untuk menunjang pelaksanaan tupoksi masing-masing seperti listrik telpon air dan lain-lain yang penggunaannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

4.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 2006-2010, kemajuan yang dicapai ditahun 2007 dan perkiraan tahun 2008, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2009, maka prioritas pembangunan terfokus pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi Pertanian dan UKM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Pembangunan SDM
4. Pembangunan SDA dan Pariwisata.

1. Revitalisasi Pertanian dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi secara bertahap terus meningkat, namun persentase angka kemiskinan ini masih didominasi oleh penduduk yang berada di pedesaan. Oleh karena itu, program-program pembangunan sudah seharusnya kita arahkan ke daerah-daerah pedesaan terutama daerah-daerah miskin dan berpotensi menjadi miskin. Revitalisasi pertanian dan UKM merupakan langkah strategis dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Sampai tahun 2007 dan diperkirakan hingga tahun 2008, sektor pertanian masih dapat memenuhi ketersediaan pangan Provinsi Jambi terutama makanan pokok beras, untuk tahun 2009 terus kita tingkatkan baik itu perluasan areal padi, jagung dan kedelai serta hortikultura (kentang dan kol), namun masalah yang dihadapi adalah krisis pangan global yang berakibat pada tingginya harga bahan pokok pangan ini, sehingga ada kekhawatiran distribusi bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan daerah atau lokal mengarah keluar daerah. Menyikapi adanya stagnasi penyuluhan pertanian sebagai akibat banyaknya penyuluh pertanian yang

beralih fungsi ke jabatan struktural di Pemerintahan pada tahun 2009, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, kita upayakan dapat teratasi melalui lembaga khusus yang menangani masalah penyuluh pertanian. Permasalahan lain yang dihadapi pada periode kedepan ini adalah terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan khususnya perkebunan sawit. Menyikapi kondisi ini, perlu dilakukan pembatasan lahan perkebunan untuk menjaga ketersediaan lahan pangan. Begitu pula dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian sehingga kemampuan petani untuk membuka areal tanaman pangan juga terbatas. Kemudian telah terjadi degradasi lahan tanaman pangan pada sentra produksi pangan yaitu di kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat terutama meluasnya lahan sulfat masam yang kesuburannya rendah.

Berkembangnya kegiatan pertanian dan ekonomi perdesaan akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan serta menjamin perkembangan perdesaan dan perkotaan yang integratif serta pertumbuhan industri perdesaan yang berkelanjutan. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan nelayan serta rumah tangga petani dan nelayan. Upaya revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan usaha kecil dan menengah. Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas pembangunan tersebut antara lain :

- a. Tercapainya pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan serta peternakan.
- b. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

- c. Terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Arah Kebijakan

Masyarakat perdesaan merupakan bagian terbesar penduduk Provinsi Jambi, dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut dilakukan secara menyeluruh baik secara sektoral (sektoral pertanian) maupun secara spatial(perdesaan). Pada dasarnya arah kebijakan yang ditempuh adalah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi wilayah serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi secara produktif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu beberapa arah kebijakan pembangunan pertanian dan UKM adalah sebagai berikut :

1.1. Ketahanan Pangan Daerah

Upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan daerah difokuskan pada tersedianya kebutuhan beras dari sentra-sentra produksi yang ada di Provinsi Jambi dan didukung dengan produksi palawija dan daging. Untuk itu kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara lain;

- a. Pengamanan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi padi sebesar 723.805 ton padi sawah dan 75.606 padi ladang.
- b. Peningkatan efisiensi system dan jaringan distribusi pangan yang menjamin keterjangkauan harga bahan pangan.
- c. Peningkatan Produktivitas dan produk pangan serta diversifikasi komoditi penghasil pangan pada areal perkebunan.
- d. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil untuk menurunkan susut pasca panen.
- e. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu.

- f. Pengembangan kawasan sentra peternakan dan integrasi ternak tanaman serta pengelolaan lahan dan air (padang pengembalaan ternak, kebun hijauan makan ternak, sertifikasi padang pengembalaan) serta peningkatan pangan ternak.
- g. Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

1.2 Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan

Peningkatan produksi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan dimaksudkan untuk menciptakan usaha agribisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Untuk itu, upaya yang dilakukan antara lain :

1. Pengembangan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional, seperti Kentang, Kedelai, Jagung termasuk dalam upaya program peningkatan kedelai 2009.
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Holtikultura dan sayuran spesifik lokasi.
3. Penyediaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan bibit bermutu.
4. Rehabilitasi, Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi karet.
5. Peningkatan program pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian dan petani.
6. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida
7. Pengembangan diversifikasi usahatani dan perlindungan usaha perkebunan.
8. Peningkatan nilai tambah produk pertanian/perikanan melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.
9. Pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) pertanian, peternakan, perikanan serta perkebunan.

10. Pengembangan agribisnis peternakan melalui pengembangan sentra, agropolitan, sistem informasi peternakan, penerapan teknologi pemasaran hasil, kelembagaan dan kemitraan usaha.
11. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, Terutama permodalan berupa bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat atau bergulir.
12. Peningkatan usaha perikanan skala kecil dan peningkatan pemasaran, mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
13. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
14. Pengembangan produk-produk hasil hutan yang bernilai tinggi.

1.3. Pemberdayaan Masyarakat Petani/Nelayan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani/Nelayan yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat/Petani/Nelayan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian melalui pelatihan dan studi banding.
2. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
3. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan penguatan asosiasi perkebunan
5. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian/perikanan.
6. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan melalui perdayaan petani.
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
8. Penataan kembali usaha budidaya tambak (air payau) dan air tawar.
9. Penyempurnaan sistem perbenihan serta peningkatan pembangunan sarana prasarana perikanan.

10. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir hutan atau transmigran) dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari.
11. Peningkatan rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi untuk pertanian.

1.4 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Arah kebijakan ini akan terwujud melalui kegiatan Pokok antara lain :

1. Penciptaan iklim usaha bagi KUKM.
2. Pemberdayaan dan pendampingan KSP/USP Koperasi penerima dana bergulir.
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM
4. Penumbuhan dan pemberdayaan sentra UKM
5. Peningkatan Peran Koperasi dalam mendukung usaha pertanian,
6. Perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dan waserba.
7. Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Besar
8. Pembinaan dan bantuan peralatan industri kecil
9. Pengembangan dunia usaha PMDN dan PMA
10. Peningkatan dan pengembangan ekspor dan perdagangan dalam negeri.

2. Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Upaya peningkatan infrastruktur ini diarahkan pada rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi infrastruktur transportasi, energi dan ketenagalistrikan, perumahan dan pemukiman, air minum, air limbah, persampahan dan drainase serta sumberdaya air dan sarana umumnya lainnya. Pembangunan Infrastruktur juga untuk mempercepat pembangunan daerah, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Mengingat daya dukung infrastruktur ekonomi yang masih kurang memadai dan sangat

tidak kompetitif dibanding daerah lainnya di Sumatera, oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang memadai harus dipercepat baik jumlah dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, seperti energi, ketenagalistrikan, jalan, air bersih, transportasi, pos dan telematika, pendidikan dan kesehatan.

Sasaran pembangunan infrastruktur adalah :

- a. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan irigasi, dan pembangunan infrastruktur pada kawasan banjir serta peningkatan pelayanan daerah irigasi.
- b. Meningkatkan sistem jaringan jalan yang ada dalam mendukung interkoneksi antara kawasan produksi dan jalur distribusi menuju daerah pemasaran dan outlet Provinsi Jambi.
- c. Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Tenaga surya serta Jaringan Tegangan Rendah (JTR) pada daerah yang belum terjangkau listrik.
- d. Meningkatkan lingkungan perumahan pada kawasan kumuh dan pembangunan jalan setapak.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

2.1 Sumberdaya Air

- a. Pembangunan dan rehabilitasi pengamanan sungai di daerah rawan banjir di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Ma. Jambi, Tebo, Merangin, Kerinci dan Kota Jambi.
- b. Pembinaan Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Kerinci, Ma.Jambi, Bungo, Tebo dan Sarolangun dan Kota Jambi.
- c. Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan irigasi dan rawa di Kabupaten Ma. Jambi, Tebo, Sarolangun, Kerinci dan Kota Jambi.
- d. Operasional dan Pemeliharaan (O&P).

2.2. Transportasi

- a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di
 1. Wilayah I
 2. Wilayah II
 3. Wilayah III
- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di
 - a. Wilayah I
 - b. Wilayah II
 - c. Wilayah III
- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Jalan Provinsi
- d. Pemeliharaan Rutin Sistem Mandor Pada Ruas Jalan Provinsi
- e. Peningkatan Jalan dalam Kota
- f. Rehabilitasi Jalan dalam Kota.
- g. Percepatan pembangunan pelabuhan Ma. Sabak dan Dermaga Ro Ro dan Dermaga di Pulau Berhala.
- h. Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan.
- i. Peningkatan pelayanan fasilitas Bandara, landasan Pacu Sultan Thaha dan Dipati parbo.

2.3. Ketenagalistrikan

Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah perdesaan dan terpencil melalui pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo.

2.4. Perumahan dan Permukiman

- a) Penataan dan revitalisasi kawasan strategis di Provinsi Jambi.
- b) Pembangunan prasarana dan sarana jalan lingkungan (poros Desa) di Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Timur, Kerinci dan Ma. Jambi.

- c) Pembangunan sistem air limbah melalui pembangunan Drainase primer dan sekunder di Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun dan Kota Jambi.

3. Prioritas Pembangunan Sumberdaya Manusia

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas merupakan mandat konstitusi yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk masih relatif rendah, Upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai kualitas manusia Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing.

Sasaran peningkatan sumberdaya manusia diarahkan pada pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Persentase Penduduk yang dapat Mengakses Pelayanan Pendidikan yang diukur antara lain dengan :
 - 1. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/SMP/SMA, dan APK jenjang pendidikan tinggi.
 - 2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS)
 - 3. Menurunkan Angka Buta Aksara.
- b. Meningkatkan Akses Masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan Kecakapan Hidup.
- c. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Pendidikan antar Kelompok Masyarakat termasuk antara wilayah Maju dan Tertinggal, antara Perkotaan

dan Perdesaan, antara Daerah Maju dan Daerah Tertinggal, antara penduduk Kaya dan Penduduk Miskin, serta antara Penduduk Laki-laki dan Perempuan.

- d. Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan.
- e. Meningkatkan Proporsi Keluarga yang Hidup secara Bersih dan Sehat.
- f. Meningkatnya Proporsi Masyarakat untuk memperoleh pelayanan Kesehatan baik dari Polindes, Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Tenaga Kesehatan Terlatih.
- g. Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis Paru, Diare dan HIV/AIDS;
- h. Menurunnya Prevalensi Kurang Gizi pada Balita dan
- i. Meningkatnya Ketersediaan Obat Esensial Nasional.

Arah Kebijakan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan bagi masyarakat miskin dan penduduk di daerah tertinggal dan daerah bencana. Secara lebih rinci arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut :

3.1. Meningkatnya Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui :

- a) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan dasar.

- b) Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun keatas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan.
- c) Perluasaan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal antara lain melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan menengah terutama di wilayah perdesaan dan daerah yang memiliki angka partisipasi lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja.
- d) Peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana dan tertinggal dan
- e) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Kelas III rumah sakit.

3.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui :

- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik.
- b) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium.
- c) Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni dan kebutuhan pembangunan daerah, wilayah dan kawasan.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit Kabupaten/kota khususnya di daerah terpencil dan bencana.

- e) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

3.3. Pembangunan Pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan Relevansi dengan Kebutuhan Pembangunan melalui antara lain :

Peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3.4. Memperkuat Manajemen Pelayanan Pendidikan yang dilaksanakan melalui :

- a) Penyusunan sistem dan mekanisme Perencanaan dan pengelolaan pendidikan.
- b) Pengaturan Inventarisasi dan sistem Dokumentasi sarana dan prasarana serta asset pendidikan.
- c) Penguatan Sistem Informasi Pendidikan.
- d) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendidikan.
- e) Penciptaan sistem pengawasan yang profesional dan objektif.
- f) Penyediaan data yang terkini dan akurat.

3.5 Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang dilaksanakan melalui :

- a) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat antara lain meliputi peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat, pengawasan kualitas lingkungan dan pengembangan kesehatan sistem kewilayahan dan

- b) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini antara lain meliputi pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa dan usaha kesehatan sekolah.

3.6 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Kegiatan , yang dilakukan antara lain :

- a) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- b) Peningkatan Imunisasi
- c) Peningkatan Suveilensi
- d) Penemuan dan Tata laksana penderita.

3.7 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk, Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a) Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat.
- b) Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi dan akibat gangguan kurang yodium.

3.8 Peningkatan Ketersediaan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan pangan yang dilaksanakan melalui :

- a) Peningkatan pengawasan obat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)
- b) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
- c) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan produk obat.
- d) Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

4. Prioritas Pembangunan Sumberdaya Alam dan Pariwisata

Dalam perpektif pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan

ekonomi (*resource based economy*) tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Bagi Provinsi Jambi, sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian sangat berperan sebagai sumber perekonomian daerah, dan masih sangat signifikan perannya di masa mendatang. Namun untuk Provinsi Jambi, secara umum pengelolaan SDA yang dikelola masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cenderung agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga daya dukung lingkungan menurun, ketersediaan SDA menipis, bahkan cenderung sudah berada pada tahap yang sangat mengkuatirkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini masih sangat maraknya kejadian pembalakan liar (*Illegal logging*), tebang berlebih (*Over cutting*) serta penyeludupan kayu ke luar negeri yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan di Provinsi Jambi. Sedangkan upaya pengembangan kebudayaan diarahkan pada nilai-nilai luhur dan pelestarian kekayaan budaya, yang meliputi sejarah kepurbakalaan dan benda cagar budaya.

Sasaran

a. Pengelolaan Sumberdaya Alam :

1. Peningkatan keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDRB Provinsi Jambi).
2. Penegakan hukum terutama dalam pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*), turunny penyalahgunaan izin eksplotasi hasil hutan dan peredaran/perdagangan hasil hutan illegal.
3. Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
4. Turunny angka pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut dan membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yan berbasis masyarakat.
5. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan menimbulkan pencemaran.

b. Pengembangan Pariwisata melalui :

- 1) Pengembangan destinasi dan jenis wisata unggulan;
- 2) Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata dan kebudayaan
- 3) Pengembangan nilai budaya daerah
- 4) Pengembangan pemasaran pariwisata.

Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan yang ditempuh untuk pengembangan dalam pengelolaan sumberdaya alam dilakukan melalui :

4.1. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk :

- a) Penurunan kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu illegal, pembakaran hutan serta perambahan dan okupasi kawasan hutan.
- b) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan melalui meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam dan disekitar hutan.
- c) Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.
- d) Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
- e) Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
- f) Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal.

4.2. Pembangunan kelautan diarahkan untuk

- a) Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir secara lestari berbasis masyarakat.
- b) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat.

- c) Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak.
- d) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar.
- e) Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.

4.3. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk :

- a) Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.
- b) Meningkatkan akurasi data, promosi dan pelayanan informasi mineral, batubara, air bawah tanah dan panas bumi.
- c) Menginventarisasi dan merehabilitasi lahan dan kawasan pasca tambang.
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.
- e) Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan.

4.4. Arah kebijakan pengembangan kebudayaan dan Pariwisata yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dilakukan melalui :

- a) Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui penyelenggaraan even daerah, event dalam dan laur negeri, promosi melalui media cetak maupin elektronik.
- b) Pengembangan Destinasi Pariwisata, dilakukan melalui pengembangan daya tarik wisata, peningkatan mutu pelayanan usaha sarana dan jasa pariwisata.
- c) Pengelolaan kekayaan budaya dilakukan melalui peningkatan apresiasi seni, transkripsi dan transliterasi naskah kuno.

- d) Pengelolaan Ragam budaya dilakukan melalui sarasehan dan seni budaya, festival ragam budaya.

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami defisit dimana belanja lebih besar daripada pendapatan daerah, maka penggunaannya dapat didanai dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA). Diproyeksikan sisa lebih anggaran tahun 2008 mencapai Rp. 363.700.219.739,- yang dialokasikan untuk menutupi defisit belanja pada tahun 2009.

Tabel.4.2. Rencana dan Target Pembiayaan Daerah

No	PEMBIAYAAN DAERAH	Pendapatan 2009	Pendapatan Perubahan 2009	Bertambah/ Berkurang
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	386.301.604.937	363.700.219.739	(22.601.385.198)
1	Penerimaan Pembiayaan			
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	386.301.604.937	363.700.219.739	(22.601.385.198)
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisah	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000	-	(9.000.000.000)
2	Pengeluaran Pembiayaan			
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	9.000.000.000	-	(9.000.000.000)
2.3	Pembayaran pokok hutang	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman daerah	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	377.301.604.937	363.700.219.739	(31.601.385.198)

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2009 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagaijabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2009 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2009 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2009. Karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategis dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.